

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending process*), sehingga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan, yang ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila (Mutia et al., 2022, hal. 81). Pendidikan merupakan hak dasar, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”, kemudian hal ini dipertegas kembali melalui Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Pendidikan Nasional (Suryadi & Ndonga, 2023, hal. 460). Pendidikan memiliki peran penting sebagai sarana pembentukan karakter bangsa. Dalam konteks ini, karakter bangsa dapat diartikan sebagai kumpulan nilai-nilai, sikap, dan perilaku (Hodriani et al., 2023, hal. 18). Hak untuk mendapatkan pendidikan diperuntukkan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali anak yang memiliki kebutuhan khusus (Yuwono & Mirnawati, 2021, hal. 2016).

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki karakteristik khusus yang memiliki perbedaan dengan anak pada umumnya. Anak kebutuhan khusus merupakan anak yang secara signifikan mengalami kelainan (fisik, mental, intelektual, sosial dan emosional) dalam proses tumbuh kembangnya sehingga memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus (Ningrum, 2022, hal.

187). Salah satu anak yang berkebutuhan khusus ialah mereka penyandang tunanetra.

Anak tunanetra merupakan anak yang memiliki gangguan ataupun kerusakan pada indera penglihatannya, sehingga mengandalkan indera lain untuk memperoleh informasi (Baktara & Setyawan, 2021, hal. 1). Dikarenakan gangguan yang dimiliki anak pengidap tunanetra memiliki kebutuhan khusus dalam proses belajar baik dalam pendidikan formal maupun informal (L. A. Putri, 2020, hal. 24). Menurut data kementerian kesehatan RI menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas tunanetra di Indonesia mencapai 1,5 persen keseluruhan penduduk Indonesia. Jika saat ini jumlah penduduk di Indonesia mencapai lebih dari 270 juta jiwa, maka jumlah penyandang disabilitas tunanetra berada pada kisaran 4 juta jiwa (Imran, 2024, hal. 229).

Banyak tantangan yang dialami para penyandang tunanetra salah satu tantangan yang dihadapi penyandang tunanetra dalam proses pendidikan ialah pengemabangan karakter dalam proses belajar,hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki sehingga memerlukan dukungan khusus. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh peserta didik penyandang tunanetra pemerintah membangun suatu sistem pendidikan inklusif. Komitmen secara nasional untuk menanamkan karakter melalui dunia pendidikan (Kabatiah, 2021, hal. 66). Pendidikan adalah landasan pertama yang berperan dalam membentuk baik dan buruknya karakter seseorang, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dengan tujuan menjadikan siswa menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan mampu menjadi warga negara yang

demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (M. D. Putri et al., 2025, hal. 1437).

Pendidikan inklusif menjadi solusi bagi para penyandang tunanetra dalam mengakses kesempatan yang sama untuk berkembang baik dalam hal akademik maupun karakter hal ini disebabkan pendidikan inklusif mempresentasikan keseluruhan aspek pendidikan yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara, pendidikan inklusif merupakan sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD,SMP, SMU, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan inklusif menggabungkan antara anak berkebutuhan khusus terutama tunanetra dengan anak umum lainnya sehingga terjadi kesempatan yang sama (Putra, 2022, hal. 68).

Pendidikan inklusif memiliki peran krusial dalam mengembangkan kemandirian siswa tunanetra juga turut memberikan peran yang penting dalam memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak (Manalu, 2024, hal. 6600).

Dengan menyediakan lingkungan belajar yang setara dan aksesibel, pendidikan inklusif memungkinkan siswa tunanetra untuk berinteraksi dengan teman sebaya, mengasah keterampilan sosial, dan membangun rasa percaya diri. Interaksi ini membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, yang pada gilirannya meningkatkan

kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sebab bangunan ideal kewargaan (*citizenship*) diantaranya tercermin kemampuan partisipasi warga secara penuh dan nyata dalam kerangka relasi dengan individu (Rachman et al., 2024, hal. 5).

Kemandirian merupakan karakter yang penting bagi anak tunanetra untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari guna menggali serta mengeksplorasi kemampuan sehingga dapat mencapai potensi maksimal yang dimiliki. Kemandirian juga merupakan visi dari kemendikbud 2020-2024 yang merupakan bagian dari visi Indonesia 2045 dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global (L. A. Putri, 2020, hal. 23). Kemandirian bukan sekedar kemampuan dalam melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain hal ini juga meliputi aspek kepercayaan diri, bertanggung jawab atas tindakan dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Bagi anak tunanetra, pengembangan kemandirian sangat penting, terutama untuk memastikan mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah dengan lebih mandiri dan percaya diri (Sa'diyah, 2017, hal. 36).

Keterbatasan penglihatan yang dialami oleh peserta didik tunanetra dapat mengakibatkan berbagai hambatan dalam proses belajar. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran visual, mengikuti instruksi tertulis di papan tulis, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang membutuhkan koordinasi *visual-motorik*. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa

frustasi dan menurunkan motivasi belajar mereka jika tidak ditangani dengan tepat seperti yang diungkapkan oleh Lowenfeld (1973), "Ketunanetraan memberikan tiga keterbatasan dasar terhadap perkembangan anak, yaitu: (1) dalam tingkat dan keanekaragaman pengalaman, (2) dalam kemampuan untuk bergerak di dalam lingkungannya, dan (3) dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Faidah, 2024, hal. 3155).

Oleh karena itu pengembangan kemandirian penting bagi anak tunanetra sebab anak tunanetra yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan mereka. Mereka cenderung lebih berani untuk mengambil inisiatif, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan mengembangkan diri tanpa terlalu bergantung pada orang lain (Yuliani, 2023, hal. 152). Kemandirian bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri mereka, tetapi juga memotivasi untuk terus belajar dan berkembang meskipun menghadapi keterbatasan fisik. Dengan kemandirian, anak tunanetra akan merasa lebih berdaya dan memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk beradaptasi lebih baik dalam lingkungan sosial dan pendidikan, serta lebih mampu mengatasi rintangan yang mungkin muncul. Mereka juga akan lebih siap untuk mengoptimalkan berbagai alat bantu dan teknologi yang ada, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih efektif dan efisien (Ramayanti & Iranda, 2022, hal. 22).

Dalam mendukung argumentasi ini, teori humanisasi Paulo Freire relevan digunakan, pemikiran Paulo Freire memberikan landasan penting untuk memahami pengembangan karakter dan kemandirian siswa tunanetra dalam pendidikan

inklusif. Melalui karyanya *Pedagogy of the Oppressed* (1970), Freire memperkenalkan konsep humanisasi yang menekankan bahwa pendidikan sejati adalah proses memanusiakan manusia, yakni menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang memiliki martabat, kebebasan, serta potensi untuk berkembang. Ia menolak konsep pendidikan gaya bank yang menempatkan siswa hanya sebagai objek pasif, dan menggantinya dengan pendekatan dialogis, partisipatif, serta membebaskan (Zainal Abidin, 2022, hal. 107).

Konsep humanisasi ini sangat relevan dengan praktik pendidikan inklusif karena menuntut adanya pengakuan terhadap keberagaman, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penolakan terhadap diskriminasi. Dalam konteks siswa tunanetra, pendekatan humanisasi menjadikan mereka bukan sekadar objek belas kasihan, melainkan subjek pembelajaran yang setara dan berdaya. Pendidikan inklusif berbasis humanisasi bukan hanya membuka akses ruang kelas, tetapi juga membebaskan siswa dari stigma dan marginalisasi sosial, sekaligus memberdayakan mereka agar mampu berkembang optimal sesuai potensi masing-masing. Dengan demikian, teori humanisasi Freire menjadi kerangka konseptual yang kokoh dalam penelitian ini untuk melihat praktik baik di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam sebagai upaya konkret membentuk karakter siswa tunanetra agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kritis, dan bermartabat.

Dalam praktik pendidikan inklusif, pembentukan karakter kemandirian tidak hanya menjadi tujuan pedagogis, tetapi juga bagian dari pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang secara holistik membentuk individu sebagai warga negara yang berdaya. Melalui pendekatan *civic education*, penguatan

kemandirian siswa tunanetra dapat dilihat dari tiga pilar penting, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (sikap kewarganegaraan) (Arpani & El Muhtaj, 2023, hal. 89). *Civic knowledge* menurut Jamaludin, aspek penting yang digali di dalam pembelajaran PKn dalam dimensi karakter ini yaitu kecakapan berpikir kritis, argumentative, dan solutif mencakup pemahaman siswa terhadap hak-haknya sebagai individu dan warga negara, serta kesadaran atas peran dan tanggung jawabnya dalam Masyarakat (Jamaludin, 2022, hal. 2521). *Civic skills* berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, membuat keputusan, berkomunikasi efektif, dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Sementara *civic disposition* berhubungan dengan sikap-sikap positif yang mendukung kehidupan bersama seperti rasa tanggung jawab, toleransi, empati, dan kerja sama (Feriandi & Harmawati, 2018, hal. 1–2).

Ketiga aspek *civic* tersebut sangat relevan diterapkan dalam penguatan kemandirian siswa tunanetra. Dengan *civic knowledge*, siswa memahami bahwa mereka memiliki hak untuk belajar, berekspresi, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sekolah. Melalui *civic skills*, mereka dilatih untuk mampu menyelesaikan tantangan sehari-hari secara mandiri, seperti mobilisasi di lingkungan sekolah. Dan melalui *civic disposition*, mereka ditumbuhkan nilai-nilai kemandirian, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dalam mengembangkan kemandirian siswa tunanetra dalam melakukan aktivitas sehari-hari, peran guru sangat penting bagi mereka untuk mendidik, melatih dan mengajarkan hal-hal yang berbentuk kemandirian sebagai profesi yang mulia, guru

PPKn tidak hanya dituntut untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam aspek kognitifnya saja. Akan tetapi sikap atau *afektif* (Nurgiansah & Rachman, 2022, hal. 68). Oleh karena itu perlu dilakukan program program yang mendukung kemandirian siswa tunanetra (Damayanti & Anando, 2021, hal. 52).

SMA Negeri 2 Lubuk Pakam merupakan salah satu sekolah menengah atas yang menerapkan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung, diketahui bahwa sekolah ini secara aktif telah menerapkan berbagai praktik baik dalam mendukung pembentukan karakter kemandirian siswa tunanetra. Saat ini terdapat 8 siswa tunanetra yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut, terdiri dari 1 orang siswa kelas XII, 5 orang siswa kelas XI, dan 2 orang siswa kelas X. Keberadaan mereka di lingkungan sekolah bukan hanya sebagai peserta didik yang harus disesuaikan kebutuhannya, tetapi juga sebagai subjek pendidikan yang dilibatkan dalam berbagai aktivitas yang membentuk kemandirian dan karakter kewarganegaraan.

Salah satu praktik baik yang dilakukan sekolah adalah program orientasi dan mobilitas yang diberikan kepada siswa tunanetra setiap awal tahun ajaran. Program ini bertujuan untuk membantu mereka mengenali lingkungan sekolah dan mengakses fasilitas umum seperti kamar mandi, kantin, serta ruang kelas tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Program ini menjadi bentuk nyata dari penguatan civic skills siswa tunanetra, karena mereka diajak untuk mengenali tantangan, belajar menghadapi situasi secara mandiri, serta mengambil keputusan dalam setiap aktivitas harian. Selain itu, dukungan dari guru dan komunitas sekolah dalam menciptakan budaya inklusif menjadikan nilai-nilai *civic disposition* seperti

kerja sama, empati, dan saling menghargai, tumbuh dengan baik di lingkungan tersebut.

Penguatan karakter kemandirian dalam pendidikan inklusif tidak dapat dilepaskan dari peran guru yang mendidik, membimbing, dan melatih siswa tunanetra untuk menjadi individu yang mandiri dan percaya diri. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan ruang belajar yang memberdayakan (Setiawan & Sitorus, 2017, hal. 122). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengeksplorasi dan mendokumentasikan praktik baik berkarakter dalam pendidikan inklusif yang telah diterapkan, agar dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di sekolah lain.

Dari pra penelitian awal yang dilakukan di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam telah berupaya mengintegrasikan siswa tunanetra ke dalam lingkungan belajar yang sama dengan siswa lainnya dengan berbagai cara dan metode yang telah diterapkan di sekolah dalam mendukung kemandirian siswa penyandang tunanetra terkait praktik baik dalam pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam . Pada penelitian ini peneliti ingin menggali lebih dalam terkait dengan pengalaman yang dialami guru, siswa tunanetra dan juga sekolah dalam melaksanakan praktik kemandirian yang dilakukan di sekolah.

Harapan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan juga contoh bagi penerapan dan juga pengembangan program-program kemandirian yang akan dilakukan selanjutnya pada sekolah sekolah inklusif, hal ini dasari dari kurangnya penelitian yang mengkaji terkait dengan pengalaman dan lebih cenderung kepada

pengujian suatu program yang mendukung kemandirian, seperti contoh penelitian yang dilakukan oleh Sumiati dkk. yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Model Pembelajaran Berbasis Karakter pada Siswa Berkebutuhan Khusus” dimana pada penelitian lebih berfokus terhadap model pembelajaran yang membangun karakter kemandirian (Sumiati, Muttaqin & Rejeki, 2023).

Padahal, pengalaman terkait dengan praktik berkarakter kemandirian dapat menjadi acuan sebagai penelitian lebih lanjut dalam menentukan program yang sesuai dalam membangun karakter kemandirian. Karakter kemandirian sangat penting bagi warga negara karena membantu mereka menjadi individu yang bertanggung jawab, percaya diri, dan mampu mengambil keputusan secara mandiri dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Kemandirian mendorong warga negara untuk berpikir kritis dan rasional dalam menentukan sikap politik, sosial, dan ekonomi, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok atau pengaruh negatif dari luar. Dalam aspek sosial, karakter kemandirian membentuk individu yang peduli terhadap lingkungan, aktif berkontribusi dalam masyarakat, serta menghormati hak dan kewajiban orang lain, yang pada akhirnya memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis (Nurdiansyah & Dewi, 2021, hal. 108).

Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun karakter kemandirian di sekolah pada anak tunanetra.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemandirian seperti tanggung jawab, keberanian dalam menyuarakan pendapat, serta kemampuan mengambil keputusan secara bijak. PPKn mampu membentuk siswa menjadi individu yang mandiri, kritis, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi (Cicilia & Santoso, 2022, hal. 147)

Sebagai bagian dari upaya membentuk karakter siswa dalam pendidikan inklusif, integrasi nilai-nilai kemandirian perlu dioptimalkan. Pembelajaran yang diarahkan pada penguatan karakter tidak hanya menekankan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai moral seperti tanggung jawab, kemandirian, dan kepedulian sosial, khususnya bagi siswa tunanetra.

Dalam konteks ini, nilai kemandirian dapat dikembangkan melalui dua aspek utama, yakni aspek kurikuler dan sosiokultural. Pada aspek kurikuler, kemandirian dibentuk melalui kegiatan pembelajaran yang adaptif, partisipatif, dan kontekstual, yang memberi ruang bagi siswa tunanetra untuk berpikir kritis, membuat keputusan secara mandiri, serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada aspek sosiokultural, kemandirian diperkuat melalui lingkungan sekolah yang inklusif, interaksi sosial yang positif, dan dukungan dari guru serta teman sebaya dalam membangun rasa percaya diri dan kemampuan berkontribusi di lingkungan sekitar. Nilai kemandirian dalam pendidikan inklusif mencerminkan kemampuan siswa tunanetra untuk bertindak secara otonom, bertanggung jawab, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Kemandirian ini

merupakan bagian penting dari pembentukan karakter, yang menyatu dengan dimensi moral, sosial, yuridis, dan politis, sehingga menghasilkan individu yang tidak hanya memahami kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga mampu berperan aktif di dalamnya (Yudha et al., 2024, hal. 270–271).

Pengalaman siswa tunanetra dalam menjalani praktik berkarakter kemandirian dapat menjadi acuan penting dalam merancang program pembinaan karakter di sekolah, khususnya dalam lingkungan pendidikan inklusif. Nilai-nilai seperti tanggung jawab atas keputusan pribadi, keberanian bertindak mandiri di tengah tekanan sosial, serta kontribusi aktif dalam kehidupan sekolah dan masyarakat mencerminkan perwujudan nyata dari pendidikan karakter yang mampu menjangkau seluruh peserta didik tanpa terkecuali, termasuk siswa dengan hambatan penglihatan.

Karakter kemandirian siswa tunanetra terbentuk tidak hanya melalui proses pembelajaran yang adaptif, tetapi juga melalui lingkungan yang mendukung pengembangan kepercayaan diri, otonomi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial sekolah. Oleh karena itu, membangun karakter kemandirian bukan hanya menjadi tujuan pendidikan secara personal, melainkan juga bagian dari misi nasional dalam membentuk warga negara yang aktif, sadar hukum, serta memiliki ketangguhan moral di tengah kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pendidikan inklusif berperan strategis dalam membentuk generasi, termasuk siswa tunanetra, yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga tangguh secara karakter dan mandiri dalam bertindak, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi landasan pendidikan nasional. Berdasarkan

latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PRAKTIK BAIK MEMBANGUN KARAKTER DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI SISWA TUNANETRA DI SMA NEGERI 2 LUBUK PAKAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka ditemukan beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Karakter kemandirian siswa tunanetra di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam masih membutuhkan perhatian khusus, khususnya dalam hal bagaimana proses pengembangan kemandirian tersebut berlangsung secara sistematis dalam lingkungan pendidikan inklusif.
2. Peran guru sebagai pendidik, pembimbing, dan pelatih sangat penting dalam membentuk kemandirian siswa tunanetra, namun pelaksanaannya perlu ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung pengembangan karakter kemandirian.
3. Dukungan teman sejawat (siswa *non-difabel*) menjadi faktor penting dalam membangun rasa percaya diri dan kemandirian siswa tunanetra, tetapi perlu diidentifikasi bagaimana bentuk dukungan ini hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa di sekolah.
4. Peran sekolah, baik melalui kebijakan, program, maupun penyediaan fasilitas yang inklusif, menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kemandirian siswa tunanetra,

yang juga perlu dikaji secara lebih dalam untuk melihat praktik baik yang telah dijalankan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang telah disebutkan pada latar belakang masalah dengan maksud agar peneliti lebih terfokus pada permasalahan utama yang hendak diteliti, yaitu :

1. Karakter kemandirian siswa tunanetra, khususnya bagaimana proses pengembangan kemandirian tersebut berlangsung dalam lingkungan pendidikan inklusif.
2. Peran guru dalam mendidik, membimbing, dan melatih kemandirian siswa tunanetra selama proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah.
3. Dukungan teman sejawat (siswa non-difabel) terhadap siswa tunanetra, serta bagaimana interaksi dan hubungan sosial mereka berkontribusi dalam membangun rasa percaya diri dan kemandirian siswa tunanetra.
4. Peran sekolah, termasuk kebijakan, program, serta fasilitas penunjang yang disediakan oleh pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mengembangkan kemandirian siswa tunanetra.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana karakter kemandirian siswa tunanetra dibangun dalam pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam?

2. Bagaimana peran guru dalam mendukung kemandirian siswa tunanetra SMA Negeri 2 Lubuk Pakam?
3. Bagaimana dukungan teman sejawat dalam mempengaruhi perkembangan kemandirian siswa tunanetra di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ?
4. Bagaimana peran sekolah dalam mendukung kemandirian siswa tunanetra SMA Negeri 2 Lubuk Pakam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana karakter kemandirian siswa tunanetra dibangun dalam pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam.
2. Untuk menggambarkan peran guru dalam mendukung kemandirian siswa tunanetra di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam.
3. Untuk menjelaskan bagaimana dukungan teman sejawat mempengaruhi perkembangan kemandirian siswa tunanetra di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam.
4. Untuk menguraikan peran sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian siswa tunanetra di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terkait pengalaman siswa tunanetra bagaimana pendidikan inklusif mendukung kemandirian.
- b. Menambah wawasan dalam kajian pendidikan inklusif, khususnya terkait peran guru dalam mendukung kemandirian siswa tunanetra.
- c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang strategi pembelajaran dan pembinaan kemandirian siswa dengan disabilitas, khususnya tunanetra.
- d. Memperkaya penelitian fenomenologi dalam bidang pendidikan khusus.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Guru : Memberikan wawasan mengenai strategi efektif dalam membimbing siswa tunanetra agar lebih mandiri dalam akademik dan kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi Siswa Tunanetra : Meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik dalam mengembangkan kemandirian mereka di lingkungan sekolah dan sosial.
- c. Bagi Sekolah : Sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan dalam mendukung pendidikan inklusif bagi siswa tunanetra.